

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2018



BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Jakarta

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi lain penyusunan LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategik Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2017–2022. Dalam penyusunan LAKIP ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga penyajian LAKIP Badan Penghubung Pemerintah Aceh ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 30 Januari 2019
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

ALMUNIZA KAMAL, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 19800120 199912 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Data Umum Organisasi	1
C. Struktur Organisasi.....	1
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis tahun 2017-2022.....	6
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Penetapan Kinerja tahun 2018.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran	12
BAB IV PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16

LAMPIRAN

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Data Umum Organisasi	1
C. Struktur Organisasi.....	1
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis tahun 2017-2022.....	6
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Penetapan Kinerja tahun 2018.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran	12
BAB IV PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16

LAMPIRAN

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2018 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Capaian Kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 3 sasaran strategis yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja utama. Capaian Kinerja Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk tahun 2018 adalah 225%. Sedangkan laporan realisasi keuangan sebesar 79,762%.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan yaitu program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah, program Pagelaran Seni Budaya Daerah dan program Pengembangan Data Informasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta, 30 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

ALMUNIZA KAMAL, S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19800120 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran utama Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta.

B. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama, membina masyarakat Aceh Perantauan di Pulau Jawa, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja pemerintah Aceh dengan pemerintah dan pemerintah provinsi lain;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan perwakilan negara asing di Jakarta
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja gubernur dan/atau pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumberdaya alam dan seni budaya; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai struktur organisasi yang disusun untuk mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Hal tersebut diimplementasikan dalam susunan organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang terdiri atas:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Acehperantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Aset pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian adalah unsur pembantu Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan,
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang undangan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,
- Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset pemerintah Aceh di pulau jawa;
- Pelaksanaan dan pengkordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang hubungan antar lembaga instansi pemerintah/swasta dan masyarakat mukim. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Sub bidang Hubungan Antar Lembaga dan masyarakat mempunyai fungsi :

- Pelaksana Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat
- Pelaksanaan hubungan antar lembaga

- Pelaksanaan hubungan masyarakat
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat

d. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi

Seksi Pelayanan dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu pemerintah Aceh

Seksi pelayanan dan informasi mempunyai fungsi :

- Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah,
- Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi
- Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya,
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi

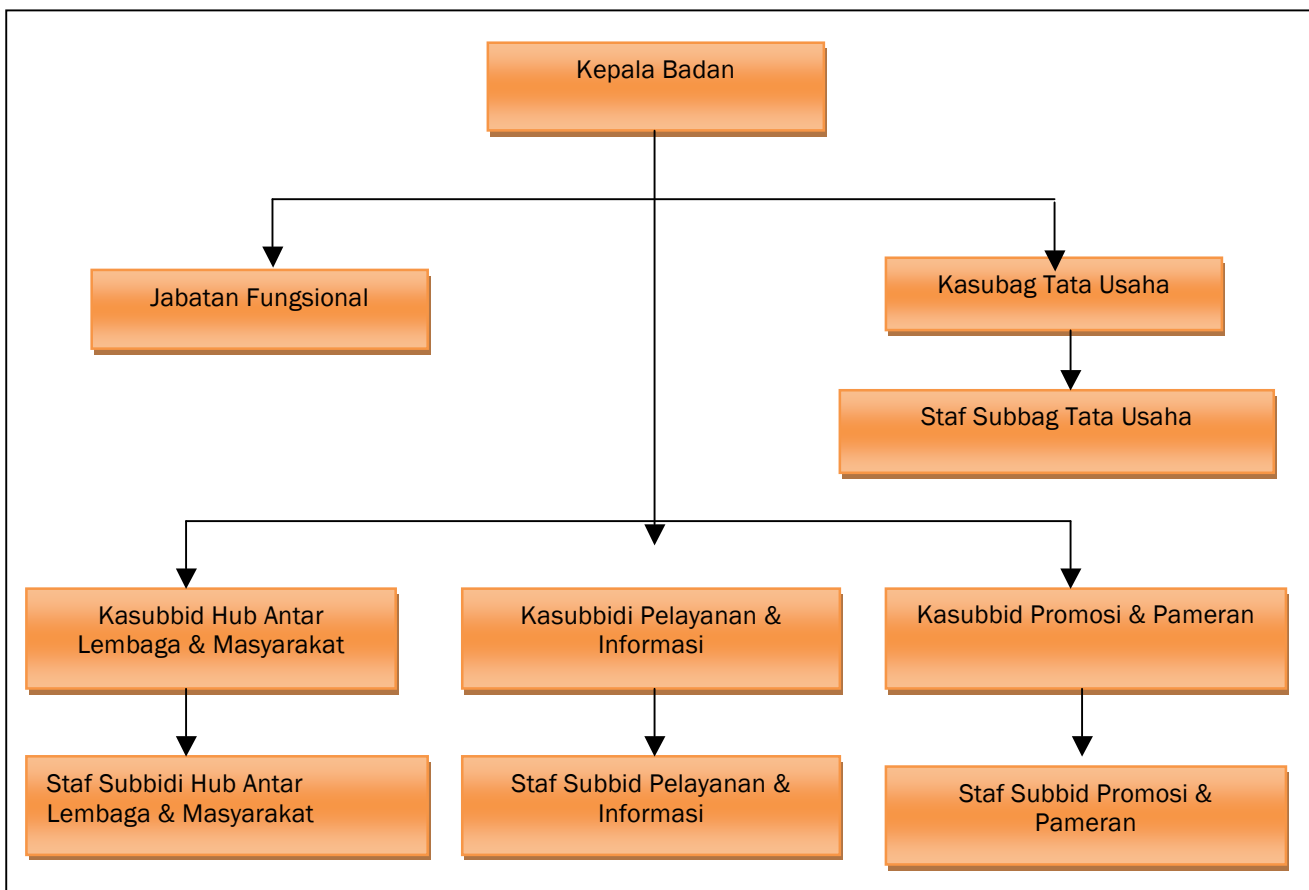
e. Seksi Promosi dan Pameran

Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- Penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh
- Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di jakarta dan sekitarnya
- Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh



D.Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan penekanan kepada aspek strategis (*strategic issued*) yang sedang di hadapi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang Capaian Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, untuk setiap sasaran srategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategik yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global.

A. Rencana Strategis Tahun 2017 -2022

Perencanaan strategik merupakan langkah awal dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

1. Visi dan Misi Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang merujuk pada visi misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 yaitu ***“Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil, Dan Melayani”***. Adapun Misi Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang terkait dengan Misi Pemerintah Aceh yaitu :

1. Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan ;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlulsunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain ;
3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Badan Penghubung Pemerintah Aceh diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan visi, misi

2. Tujuan, Sasaran dan Program

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yaitu :

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh yaitu:

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas;
2. Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami;
3. Terwujudnya Informasi dan Data yang Terintegritas.

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik;
2. Memperkuat tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi yang terintegrasi melalui website.

c. Program

Pada tahun 2018 Badan Penghubung Pemerintah Aceh melaksanakan 6 (enam) program kerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah
5. Program Pengembangan Data dan Informasi

B. Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Utama merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang kemudian digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai instansi yang mempunyai fungsi utama dalam Pelayanan dan promosi Aceh di Jakarta juga menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Penghubung Pemerintah Aceh**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas Birokrasi pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dilayani}}{\text{Jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$	Data masyarakat yang puas terhadap pelayanan, diperoleh dari kuesioner. Semakin tinggi persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, memperlihatkan kualitas birokrasi pelayanan publik yang meningkat.	1. Subbidang Pelayanan dan Informasi 2. Subbidang Hubungan Lembaga dan Masyarakat
2.	Menguatkan tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami	Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek	Menghitung jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek	Semakin tinggi jumlah pengunjung, maka akan menguatkan tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.	Subbidang Promosi dan Pameran
3.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang terintegrasi melalui website	Persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	Jumlah pengunjung website yang puas $\frac{\text{Jumlah pengunjung website}}{\text{Jumlah pengunjung website}} \times 100\%$	Semakin tinggi persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website memperlihatkan kualitas data dan informasi yang terintegrasi meningkat.	Subbidang Pelayanan dan Informasi

C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017. Penetapan kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh 2018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat Aceh di perantauan se Jabodetabek	Persentase kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Aceh di Jabodetabek	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu Pemerintah Aceh yang bertugas ke Jakarta dan sekitarnya	Persentase kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani	100%
3	Meningkatkan pengelolaan promosi potensi, sumber daya dan seni budaya Aceh	Jumlah Partisipasi serta kunjungan publik terhadap pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah dan seni budaya Aceh	10.000 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa penetapan kinerja menyajikan informasi – informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan, serta jumlah anggaran yang di rencanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh diukur dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dengan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2017.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh.

Pengukuran capaian indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN/ REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat Aceh di perantauan se Jabodetabek	Persentase kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Aceh di Jabodetabek	100 %	100 %	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu Pemerintah Aceh yang bertugas ke Jakarta dan sekitarnya	Persentase kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani	100 %	0 %	0%
3	Meningkatkan pengelolaan promosi potensi, sumber daya dan seni budaya Aceh	Jumlah Partisipasi serta kunjungan publik terhadap pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah dan seni budaya Aceh	10000 orang	22505 orang	225%

Total keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama tahun anggaran 2018 rata-rata **108,3%**.

Indikator Persentase kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Aceh di Jabodetabek adalah kegiatan ini berupa bantuan tiket bus menuju Aceh bagi masyarakat Aceh yang terlantar, penampungan serta bantuan pelayanan lainnya

terhadap masyarakat. Dari keseluruhan pelayanan yang dilakukan, dari hasil kuesioner 100% masyarakat puas akan pelayanan BPPA.

Pada penetapan kinerja tahun 2018 terdapat satu indikator kinerja yang tidak dihitung realisasinya sehingga nilai realisasi 0% yaitu *indikator persentase kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani*. Hal ini disebabkan adanya revisi Renstra BPPA 2017-2022 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan RPJM 2017-2022, sehingga menyebabkan sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra sebelumnya mengalami perubahan, yang dapat dilihat dalam Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPPA.

Sedangkan *Indikator Jumlah Partisipasi serta kunjungan publik terhadap pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah dan seni budaya Aceh*, realisasinya melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 225% disebabkan besarnya minat masyarakat terhadap seni dan budaya Aceh serta pada penetapan target di Perjanjian Kinerja terlalu rendah. Adapun jumlah pengunjung yang dimaksudkan yaitu jumlah tamu baik asing maupun domestik yang mengunjungi Anjungan Aceh Taman Mini Indonesia Indah baik ketika berlangsungnya acara-acara tertentu maupun yang bersifat rutin.

Perbandingan pencapaian masing-masing sasaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan % Capaian/Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% Capaian/Realisasi		Ket
			2017	2018	
1	2	3	4		
1	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat Aceh di perantauan se Jabodetabek	Persentase kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Aceh di Jabodetabek	0%	100%	Kenaikan 100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu Pemerintah Aceh yang bertugas ke Jakarta dan sekitarnya	Persentase kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani	0%	0%	Tidak ada perubahan (tahun 2017 dan 2018 tidak dilakukan pengukuran)
3	Meningkatkan pengelolaan promosi potensi, sumber daya dan seni budaya Aceh	Jumlah Partisipasi serta kunjungan publik terhadap pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah dan seni budaya Aceh	157%	225%	Kenaikan 68%

Indikator persentase kepuasan pelayanan terhadap masyarakat Aceh di Jabodetabek pada tahun 2017 tingkat kepuasannya tidak dilakukan pengukuran, sedangkan pada tahun 2018 baru dimulai pengukuran indikator tersebut, hasil dari perhitungan tersebut masyarakat Aceh di Jabodetabek tingkat kepuasannya mencapai 100 persen. hal ini menyebabkan perbandingan peningkatan menjadi 100%.

Untuk indikator persentase terhadap pejabat yang dilayani tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 tidak dilakukan pengukuran yang disebabkan oleh adanya penyesuaian indikator yang disesuaikan dengan revisi renstra 2017-2022 dan RPJM tahun 2017-2022.

Kenaikan signifikan lainnya terdapat pada Jumlah Partisipasi serta kunjungan publik terhadap pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah dan seni budaya Aceh dimana tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 68% dikarenakan target yang di tetapkan pada Penetapan Perjanjian Kinerja BPPA Tahun 2018 terlalu rendah sedangkan jumlah kunjungan masyarakat tinggi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 Badan Penghubung Pemerintah Aceh didukung anggaran sebesar Rp. 20.163.838.455,- yang bersumber dari APBA. Jumlah realisasi penarikan dana Rp. 16.082.983.586,- atau sebesar 79,762%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017 jumlah realisasi anggaran tahun 2018 berkurang sekitar 1,314% seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2017 dengan tahun 2018

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1	2017	16.938.593.233	13.733.121.923	3.205.471.310	81,076
2	2018	20.163.838.455	16.082.983.586	4.080.854.869	79,762
	<i>Selisih</i>	<i>3.225.245.222</i>	<i>2.349.861.663</i>		

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran terlihat ada sisa anggaran sebesar 4.080.854.869 dikarenakan Mess Aceh yang belum berfungsi dan adanya anggaran air tanah yang tidak terpakai dan honorarium petugas Mess Aceh yang belum bisa direalisasikan dikarenakan belum beroperasi.

Rincian realisasi anggaran Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2018 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	5.320.578.014	4.587.768.261	86,23%
	Gaji dan Tunjangan	5.320.578.014	4.587.768.261	86,23%
2.	Belanja Langsung	14.843.260.441	11.495.215.325	77,44%
	Belanja Pegawai	2.574.758.000	1.368.410.000	53,15%
	Belanja Barang dan Jasa	8.997.512.441	7.036.538.456	78,21%
	Belanja Modal	3.270.990.000	3.090.366.869	94,48%

Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan program dan kegiatan untuk tahun 2018 pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Tabel Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2018

NO	NON PROGRAM/ PROGRAM	KEGIATAN/BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	BOBOT	REALISASI			SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN	
					%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			20.163.838.455	100%		16.082.983.586	79,762%	4.080.854.869
	<i>Non Program</i>	Belanja Tidak Langsung	5.320.578.014	26,39%	86,227%	4.587.768.261	86,227%	732.809.753
		- Belanja Pegawai	5.320.578.014	26,39%	86,227%	4.587.768.261	86,227%	732.809.753
	Program	Belanja Langsung	14.843.260.441	73,61%	98,497%	11.495.215.325	77,444%	3.348.045.116
	<i>Pelayanan administrasi</i>	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.200.000	0,30%	100,000%	60.056.916	99,762%	143.084
	<i>Perkantoran</i>	- Belanja Barang/Jasa	60.200.000	0,30%	100,000%	60.056.916		143.084
		2. Penyediaan Jasa Kom, Sumber Daya Air dan listrik	2.149.703.370	10,66%	100,000%	395.094.504	18,379%	1.754.608.866
		- Belanja Barang/Jasa	2.149.703.370	10,66%	100,000%	395.094.504		1.754.608.866
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000	0,50%	100,000%	92.346.000	92,346%	7.654.000
		- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0,50%	100,000%	92.346.000		7.654.000
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	285.899.996	1,42%	100,000%	281.535.950	98,474%	4.364.046
		- Belanja Barang dan Jasa	285.899.996	1,42%	100,000%	281.535.950		4.364.046
		5. Penyediaan Alat tulis Kantor	23.782.500	0,12%	100,000%	23.607.500	99,264%	175.000
		- Belanja Barang dan Jasa	23.782.500	0,12%	100,000%	23.607.500		175.000
		6. Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	35.828.550	0,18%	100,000%	35.810.350	99,949%	18.200
		- Belanja Barang dan Jasa	35.828.550	0,18%	100,000%	35.810.350		18.200
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	32.352.500	0,16%	100,000%	31.314.000	96,790%	1.038.500
		- Belanja Barang dan Jasa	32.352.500	0,16%	100,000%	31.314.000		1.038.500
		8. Penyediaan peralatan rumah tangga	66.060.000	0,33%	100,000%	56.658.467	85,77%	9.401.533
		- Belanja Barang dan Jasa	66.060.000	0,33%	100,000%	56.658.467	85,77%	9.401.533
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	847.075.000	4,20%	100,000%	833.070.855	98,347%	14.004.145
		- Belanja Barang dan Jasa	847.075.000	4,20%	100,000%	833.070.855		14.004.145
		10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	607.704.000	3,01%	100,000%	607.510.554	99,968%	193.446

		- Belanja Barang dan Jasa	607.704.000	3,01%	100,000%	607.510.554		193.446
		11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.528.858.000	12,54%	100,000%	1.312.008.800	51,881%	1.216.849.200
		- Belanja Pegawai	2.478.758.000	12,29%	100,000%	1.272.410.000	51,333%	1.206.348.000
		- Belanja Barang dan Jasa	50.100.000	0,25%	25,000%	39.598.800	79,04%	10.501.200
		12. Pelayanan Protokol Pejabat daerah di Jkt dan sekitarnya	849.445.000	4,21%	100,000%	818.759.367	96,39%	30.685.633
		- Belanja Pegawai	96.000.000	0,48%	0,000%	96.000.000	100,00%	-
		- Belanja Barang dan Jasa	753.445.000	3,74%	100,000%	722.759.367	95,93%	30.685.633
	Program	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	138.000.000	0,68%	100,000%	128.553.330	93,15%	9.446.670
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	- Belanja Barang dan Jasa	68.000.000	0,34%	100,000%	60.382.930	88,80%	7.617.070
		- Belanja Modal	70.000.000	0,35%	0,000%	68.170.400	97,39%	1.829.600
		14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.800.990.000	23,81%	100,000%	4.610.872.732	96,04%	190.117.268
		- Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000	7,93%	100,000%	1.588.776.263	99,30%	11.223.737
		- Belanja Modal	3.200.990.000	15,87%	100,000%	3.022.096.469	94,41%	178.893.531
		15. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	1.643.486.525	8,15%	100,000%	1.642.851.000	99,961%	635.525
		- Belanja Barang dan Jasa	1.643.486.525	8,15%	100,000%	1.642.851.000		635.525
		16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Ktr	142.610.000	0,71%	100,000%	55.650.000	39,023%	86.960.000
		- Belanja Barang dan Jasa	142.610.000	0,71%	100,000%	55.650.000		86.960.000
		17. Penyediaan rutin/Berkala Peralatan Kantor	22.320.000	0,11%	100,000%	21.870.000	97,984%	450.000
		- Belanja Barang dan Jasa	22.320.000	0,11%	100,000%	21.870.000		450.000
	Program	18. Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.500.000	0,11%	100,000%	9.000.000	40,000%	13.500.000
	<i>Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur</i>	- Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	0,11%	100,000%	9.000.000	40,00%	13.500.000
	Program	19. Pagelaran Seni Budaya Aceh	452.025.000	2,24%	95,000%	444.225.000	98,274%	7.800.000
	<i>Pagelaran Seni budaya</i>	- Belanja Barang dan Jasa	452.025.000	2,24%	95,000%	444.225.000	98,274%	7.800.000
	Program	20. Pengembangan Informasi Melalui website	34.420.000	0,17%	100,000%	34.420.000	100,000%	-
	<i>Pengembangan Data dan Informasi</i>	- Belanja Barang dan Jasa	34.420.000	0,17%	100,000%	34.420.000	100,00%	-

		JUMLAH	20.163.838.455	100,00%		16.082.983.586	4.080.854.869

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018, realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Hasil realisasi *Laporan Kinerja* sebesar 108,3% sedangkan *Laporan Keuangan* yaitu capaian realisasi keuangan 79,762% . Secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pemerintah dan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya.
2. Pada penetapan kinerja tahun 2018 terdapat satu indikator kinerja yang tidak dihitung realisasinya yaitu indikator persentase kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani. Hal ini disebabkan adanya revisi Renstra BPPA 2017-2022 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan RPJM 2017-2022, sehingga menyebabkan sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra sebelumnya mengalami perubahan, yang dapat dilihat dalam Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPPA.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dan instansi terkait untuk mewujudkan capaian kinerja yang maksimal.
2. Dalam melaksanakan kegiatan hendaknya melakukan perencanaan dan sosialisasi yang lebih matang sehingga tercapai target yang diharapkan.
3. Diperlukan inventarisasi data yang akurat untuk meningkatkan ketersediaan informasi yang dibutuhkan dengan ikut melibatkan berbagai pihak yang terkait.



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Jl. Indramayu No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 3142163-3919419, Fax : (021) 3100326, 3158731
Email : phb_nad@yahoo.com. Website : www.penghubung.acehprov.go.id

Jakarta , 13 Februari 2017 M
6 Jumadil Awal 1438 H

Nomor : 061/19
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian LAKIP TA 2016**

Yang Terhormat,
Sekretaris Daerah Aceh
Up. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh
di

Banda Aceh

1. Berikut ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016.
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Ir. MUHAMMAD BADRI ISMAIL

Pembina

NIP 19630707 199903 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala BPKA
5. Arsip.